

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Secara spesifik, belum ada yang membahas tentang efektivitas program kesehatan masyarakat dengan pemanfaatan dana desa, khususnya di desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Akan tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penelitian skripsi yang akan penulis teliti, mempunyai kemiripan pada penelitian skripsi yang lain. Adapun beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama dari Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayanti, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo”. Dari jurnal tersebut diketahui bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi, Desa Bangunjiwo menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya potensi ekonomi, dan potensi ekonomi utama Desa Bangunjiwo disebut kajigelem.¹ Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas dana desa, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu berada pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu

¹Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayanti, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama, “Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), Vol. 5, No. 1

Efektivitas Program Kesehatan Masyarakat dengan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Penelitian kedua dari Nova Sulastri, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo.² Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu

²Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Halu, Kendari, 2016)

sama-sama membahas tentang efektivitas dana desa, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu berada pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu Efektivitas Program Kesehatan Masyarakat dengan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Penelitian ketiga Marliyanti Rorong, Johny Lumolos dan Gustaf. J. E. Undap, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dana desa tersebut dengan tepat.³ Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas dana desa, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu berada pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu Efektivitas Program Kesehatan Masyarakat dengan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

³ Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf. J. E. Undap, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 4 (Februari 2016), h. iii.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori kesehatan masyarakat

Teori kesehatan masyarakat umumnya mirip dengan kajian teori-teori kesehatan yang ada. Hal yang membedakan teori kesehatan masyarakat dengan teori kesehatan pada umumnya adalah bahwa teori kesehatan berfokus pada keterkaitan antara sebab dan akibat dalam kesehatan yang ditekankan pada poin-poin kesehatan manusia, sedangkan kesehatan masyarakat mengkaji pola-pola kesehatan yang ada dalam kehidupan kemasyarakatan. Teori kesehatan masyarakat dicestukan oleh Winslow yang menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh kondisi yang sehat melalui usaha masyarakat yang terorganisir.⁴

Winslow mengemukakan bahwa kesehatan masyarakat bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang potensi hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merupakan akumulasi dari pola hidup sehat masyarakat dalam menyehatkan dirinya secara individual maupun menyehatkan lingkungan.

Winslow mengungkapkan bahwa kesehatan masyarakat didasari oleh perilaku kesehatan yaitu respon seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman serta lingkungan, yang berkembang menjadi perilaku kesehatan masyarakat yaitu perilaku masyarakat yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Perilaku kesehatan masyarakat dilakukan dalam empat tahap yaitu pertama tahap preventif yaitu tahap mencega dari sakit dan kecelakaan. Kedua tahap promotif yaitu tahap meningkatkan derajat kesehatan. Ketiga tahap kuratif yaitu tahap apabila masyarakat

⁴ Eliana dan Sri sumiati, Kesehatan masyarakat, (Jakarta: c.p., 2016), h. 11

sakit diupayakan untuk memperoleh kesembuhan melalui pengobatan. Dan tahap keempat yakni tahap rehabilitatif yaitu tahap pemeliharaan kesehatan.

2. Manajemen pengembangan masyarakat islam

Manajemen pengembangan masyarakat islam adalah mencakup semua aspek kehidupan baik itu yang mengatur dan mengembangkan dalam bidang kemiskinan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, dan agama.⁵ Adapun tahap-tahapan dalam manajemen pengembangan masyarakat islam dapat mengacu pada apa yang dijabarkan oleh Isbandi Rukminto Adi melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat senantiasa mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan yaitu penyiapan petugas dan penentuan lokasi program.
- b. Tahap *assesment*. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan sumber daya yang dimiliki oleh warga masyarakat. *Assesment* misalnya dilakukan melalui metode *partisipatory rural appraisal* (PRA), *focus group discussion* (FGD).
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini, pengelola program berusaha memfasilitasi warga masyarakat untuk menyusun perencanaan dan menetapkan program-program kerja sebagai agenda yang perlu dilaksanakan.

⁵Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Ciputat, 2013), h.10-11

- d. Tahap formulasi rencana aksi. Kegiatan utama pada tahap ini adalah pihak agen perubahan membantu membimbing warga atau kelompok untuk menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan kepada pihak penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan program. Tahap implementasi program ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan rencana dapat berjalan dengan lancar, maka hal-hal yang mungkin menyebabkan terjadi pertentangan baik antara pengelola program dengan warga maupun pertentangan diantara warga supaya dapat dihindari.
- f. Tahap evaluasi. Kegiatan evaluasi perlu dilakukan pada semua program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
- g. Tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahap terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat secara umum dikelola oleh masyarakat itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Ar-rad : 11 Allah swt berfirman :

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَالٍ

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah

*menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.*⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan pengembangan masyarakat islam sangat berfokus pada masyarakat itu sendiri, termasuk instansi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan sebagai bagian utuh dari masyarakat itu sendiri yang bersama-sama menggerakkan diri dalam melakukan pengembangan secara mandiri.

3. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat merupakan tugas mulia dan amanah yang telah dan terus dilakukan oleh berbagai pihak secara berkelanjutan baik individu, kelompok maupun lembaga yang tidak akan pernah selesai.⁷ Adapun konsep Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan yang bertumpu pada tiga aspek yaitu *input*, *proses*, dan *output*. Dari ketiga aspek ini diharapkan secara berkelanjutan menghasilkan *outcome* dan *impact* jangka panjang yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelembagaan masyarakat berkelanjutan serta jiwa-jiwa, komunitas, lembaga yang *concern* untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Dengan adanya 3 aspek ini, diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat bertahan, tumbuh, hidup, maju dan berkembang secara berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat baik dalam konteks kesejahteraan material maupun spiritual.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 284

⁷Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, (Kediri: FAM Publshing, 2019), h. 5-6

masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan, berkelanjutan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.⁸

Maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis. Pengembangan program berkelanjutan sangat bergantung pada proses pemberdayaan masyarakat. Adapun yang akan dikaji oleh penulis adalah tentang bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program-program kesehatan berkelanjutan di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk lebih memahami maksud dari penelitian ini, tentang “Efektivitas Program Kesehatan Masyarakat Dengan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” maka akan diberikan penjelasan maksud dari judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan. Efektifitas disebut juga efektif, jika tujuan atau sasaran

⁸<https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>, di akses pada tanggal 07 mei 2015.

yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Caster I. Bernard bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.⁹

Secara etimologi, efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) dan mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan mempunyai arti keadaan berpengaruh, keberhasilan (tentang usaha, tindakan). Adapun secara terminologi, beberapa ahli mendefinisikannya sebagai berikut:

- 1) Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar prosentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹⁰
- 2) Habey berpendapat bahwa efektif adalah tepat mengenai sasaran, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹¹

⁹Yogi Eka Prastiya, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014), h. 42

¹⁰Rany An Nisaa Syabrina, "*Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurung gresik tahun 2017*", (Skripsi Unair, 2018), h. 3

¹¹ Mangku Negara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003), h. 16

- 3) Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan tugas dinilai baik dan tidaknya sangat bergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan.¹²
- 4) Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.¹³
- 5) Robert Chambers mengemukakan bahwa secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan ukuran keberhasilan dari sebuah organisasi maupun sebuah program, oleh karena itu efektivitas sangat bergantung pada proses yang dilakukan. Karena proses merupakan jalan yang harus dilalui, maka sebuah proses memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Salah satu pentingnya efektivitas dalam Islam dapat dilihat dengan adanya efektivitas kaum muslimin yang bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang yang tidak

¹²Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 151

¹³Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Jogjakarta: Pembaruan, 2005), h. 109

¹⁴Robert Chambers, *Pembangunan desa Mulai Dari belakang*, (Jakarta: LP3S, 2008), h. 47

berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Agama islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci al-Qur'an, yaitu dalam QS. Al-Isra' ayat 26 yang berbunyi:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹⁵

Berdasarkan QS. Al-Isra' ayat 26 yang menyebutkan bahwa janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Sejalan dengan teori efektivitas yaitu dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan. Sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditujukan kepada para penguasa atau orang yang berada pada kedudukan untuk lebih bisa mengefektivaskan segala sesuatu tersebut.

b. Pendekatan dalam pengukuran efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi atau sebuah program bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misalnya, untuk sebuah perusahaan, efektivitas bisa berarti besar laba yang diperoleh, sedangkan menurut pengamat sosial, efektivitas berarti tingkat kesejahteraan pekerjanya, atau jika lembaga pendidikan yang menginterpretasikannya, maka

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 284.

efektivitas berarti kualitas lulusan peserta didiknya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai. Jika usaha atau tindakan yang dilakukan tidak tepat hingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, antara lain:

- 1) Menurut Martani dan Lubis, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi, yakni:¹⁶
 - a) Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
 - c) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
- 2) Menurut Richard M. Steers, ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:¹⁷
 - a) Pencapaian tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

¹⁶Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 2007), h. 55.

¹⁷M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 9

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

b) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

3) Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dalam:¹⁸

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya mencapai sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

¹⁸Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 77

- d) Perencanaan yang matang
Yaitu memutuskan apa yang harus dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
 - e) Penyusunan program yang tepat
Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, karena jika tidak, maka para pelaksana program akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.
 - f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Hal ini bergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mungkin disediakan oleh organisasi.
 - g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
Sebaik apapun suatu program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena itu pelaksanaan organisasi harus semakin didekatkan pada tujuannya.
 - h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
- 4) Menurut Chambers, pengukuran efektivitas secara umum dan menonjol adalah:
- a) Keberhasilan program
 - b) Keberhasilan sasaran
 - c) Kepuasan terhadap program
 - d) Tingkat input dan output
 - e) Pencapaian tujuan menyeluruh¹⁹

¹⁹Robert Chambers, *Pembangunan desa Mulai Dari belakang*, (Jakarta: LP3S, 2008), h. 121

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemanfaatan dana desa di Desa Bojo 1 sudah efektif terutama pada program kesehatan masyarakat Desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Peran serta atau inisiatif dari pemerintah desa juga sangat penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa karena wewenang utama pemerintah desa ada pada perencanaan. Pada proses perencanaan pembangunan, masyarakat Desa Bojo 1 selalu aktif ikut berpartisipasi terutama pada kegiatan MUSRENBANG sehingga pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memang tak lepas dari dibutuhkannya partisipasi masyarakat yang ikut serta aktif dalam pembangunan desa yang mulai dari perencanaan yaitu MUSRENBANG, pelaksanaan yaitu masyarakat aktif dalam memberikan usulan pengadaan dan produktivitas desa, dan juga evaluasi yaitu masyarakat aktif dalam hal pengawasan program pemerintah desa dan juga memberikan masukan, kritikan bahkan solusi guna menciptakan program yang lebih baik lagi.

Dari beberapa telaah pustaka, diketahui bahwa pemanfaatan dana desa memang sudah efektif, baik dalam pembangunan desa maupun peningkatan status kesehatan masyarakat desa. Akan tetapi, pada penelitian ini penulis ingin penekanan tidak hanya

terfokus pada hasil (*output*) semata, akan tetapi juga pada aspek proses yang dilakukan, karena hasil yang baik tidak akan tercapai tanpa melalui proses yang baik pula. Apalagi dengan adanya masalah dalam pengelolaan dana desa di beberapa daerah, kiranya perlu adanya kajian lebih mendalam tentang pelaksanaan program dana desa tersebut. Oleh karena itu, aspek proses dalam penelitian ini akan diperdalam sebagaimana pendalaman pada aspek hasil yang telah dicapai.

2. Kesehatan Masyarakat

a. Pengertian kesehatan masyarakat

Kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut UU 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehat secara mental (kesehatan jiwa) adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Sehat secara sosial adalah peri kehidupan seseorang dalam masyarakat, yang diartikan bahwa seseorang mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarga sehingga memungkinkan untuk bekerja, beristirahat dan menikmati liburan.²⁰

Berdasarkan pengertian kesehatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan ada empat dimensi, yaitu fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada

²⁰Eliana dan Sri sumiati, Kesehatan Masyarakat (Jakarta; c.p.,2016), h.2

seseorang, kelompok, atau masyarakat. Oleh karena itu, kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh, tidak hanya memandang kesehatan dari segi fisik saja. Misalnya seseorang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi ia tidak mampu mengendalikan emosinya ketika sedih maupun senang dengan mengekspresikan ke dalam bentuk perilaku berteriak atau menangis keras-keras, atau tertawa terbahak-bahak yang membuatnya sulit untuk bisa kembali ke kondisi normal, maka orang tersebut tidak sehat. Begitu pula orang yang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi tidak mampu memajukan kehidupannya sendiri dengan belajar, bekerja, ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sehat.

Berikut ini beberapa definisi kesehatan masyarakat menurut profesor Winslow dan Ikatan Dokter Amerika, AMA.²¹ Definisi pertama Ilmu kesehatan masyarakat (*public health*) menurut profesor Winslow adalah ilmu dan seni mencegah penyakit memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosis dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.

Selanjutnya definisi kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Kesehatan masyarakat diartikan sebagai

²¹Eliana dan Sri sumiati, Kesehatan Masyarakat (Jakarta; c.p.,2016), h.3-4

aplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan dalam mencegah penyakit yang melanda penduduk atau masyarakat.

Definisi terakhir dari Winslow menyatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori (ilmu) dan Praktek (seni) yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk (masyarakat). Kesehatan masyarakat adalah sebagai aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial dalam mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat.

b. Tujuan kesehatan masyarakat

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Umum

Meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri

2) Khusus

- a) Meningkatkan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam pemahaman tentang pengertian sehat sakit
- b) Meningkatkan kemampuan individu, keluarga kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan
- c) Tertangani/terlayani kelompok keluarga rawan, kelompok khusus dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan pelayanan kesehatan.

c. Program Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu problematika yang sangat kompleks di era modern saat ini. Kompleksitas masalah kesehatan disampaikan oleh Blum dalam

empat faktor utama yang menentukan derajat kesehatan masyarakat, yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan hereditas.²² Dari hal tersebut menjadi alasan perlunya dirumuskan program-program perbaikan dan pengelolaan kesehatan.

Program kesehatan sudah menjadi kewajiban bagi setiap negara untuk diberikan kepada masyarakatnya, karena kesehatan masyarakat merupakan hak yang semestinya diperoleh oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah semestinya memberikan program jaminan kesehatan kepada masyarakat. Program jaminan kesehatan adalah suatu program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap masyarakat agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.²³

Program kesehatan masyarakat sendiri merupakan program-program yang digagas sedemikian rupa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan. Ada berbagai macam program kesehatan yang dijalankan, menurut kementrian kesehatan Republik Indonesia ada beberapa program kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut²⁴;

1) Pembinaan gizi masyarakat

²²Kasman Makkasau, "Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process(Ahp)Dalam Penentuan Prioritas Program Kesehatan(Studi Kasus Program Promosi Kesehatan)", *Jurnal teknologi informasi* , (Dinas Kesehatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, 2012), vol. 7, No. 2, h. 106

²³Maman Saputra, Lenie Marlinae, Fauzie Rahman, Dian Rosadi, "Program Jaminan Kesehatan Nasional Dari Aspek Sumber Daya Manusia Pelaksana Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, 2015), Vol. 11, No.1, h. 33

²⁴Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Perncaanaan Program Kesehatan Masyarakat*, (Bekasi: GERMAS, 2018), h. 4-6

- 2) Pembinaan kesehatan keluarga
 - 3) Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga
 - 4) Pemanfaatan dukungan manajemen kesehatan
 - 5) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - 6) Program penyehatan lingkungan
- d. Paradigma kesehatan masyarakat

Paradigam kesehatan masyarakat merupakan cara pandang masyarakat atau pola pikir pembangunan kesehatan masyarakat yang bersifat holistik, pro aktif, antisipasi, dengan melihat masala kesehatan masyarakat sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral, dalam suatu wilayah yang berorientasi pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit. Sebagaimana dijelaskan oleh Blum berupa penerapan konsep hidup sehat yaitu derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi faktor lingkungan, gaya hidup, pelayanan masyarakat, dan faktor genetik.

3. Pemanfaatan Dana Desa
 - a. Asas pengaturan desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat,

dan nilai sosial budaya masyarakat Desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:²⁵

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- 2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperanaktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- 3) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- 4) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa danbernegara.
- 5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui,ditata, dan dijamin.

²⁵Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*(Jakarta: t.p., 2017), h. 2-3

- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Sesuai prinsip *money follows function* dan *money follows program*, maka desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

b. Pengertian dana desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk:

- 1) Pelaksanaan pembangunan dan
- 2) Pemberdayaan masyarakat desa.²⁶

²⁶Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: t.p., 2017), h. 12

Sedangkan penganggaran dananya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Angka kemiskinan
- 3) Luas wilayah, dan
- 4) Tingkat kesulitan geografis

c. Sumber pendapatan Desa

Melalui Undang-undang desa, desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

Sumber pendapatan desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, seperti terdapat pada pasal 72 ayat 1, pendapatan desa bersumber dari:

1) Pendapatan asli desa

Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

2) Dana desa dari APBN

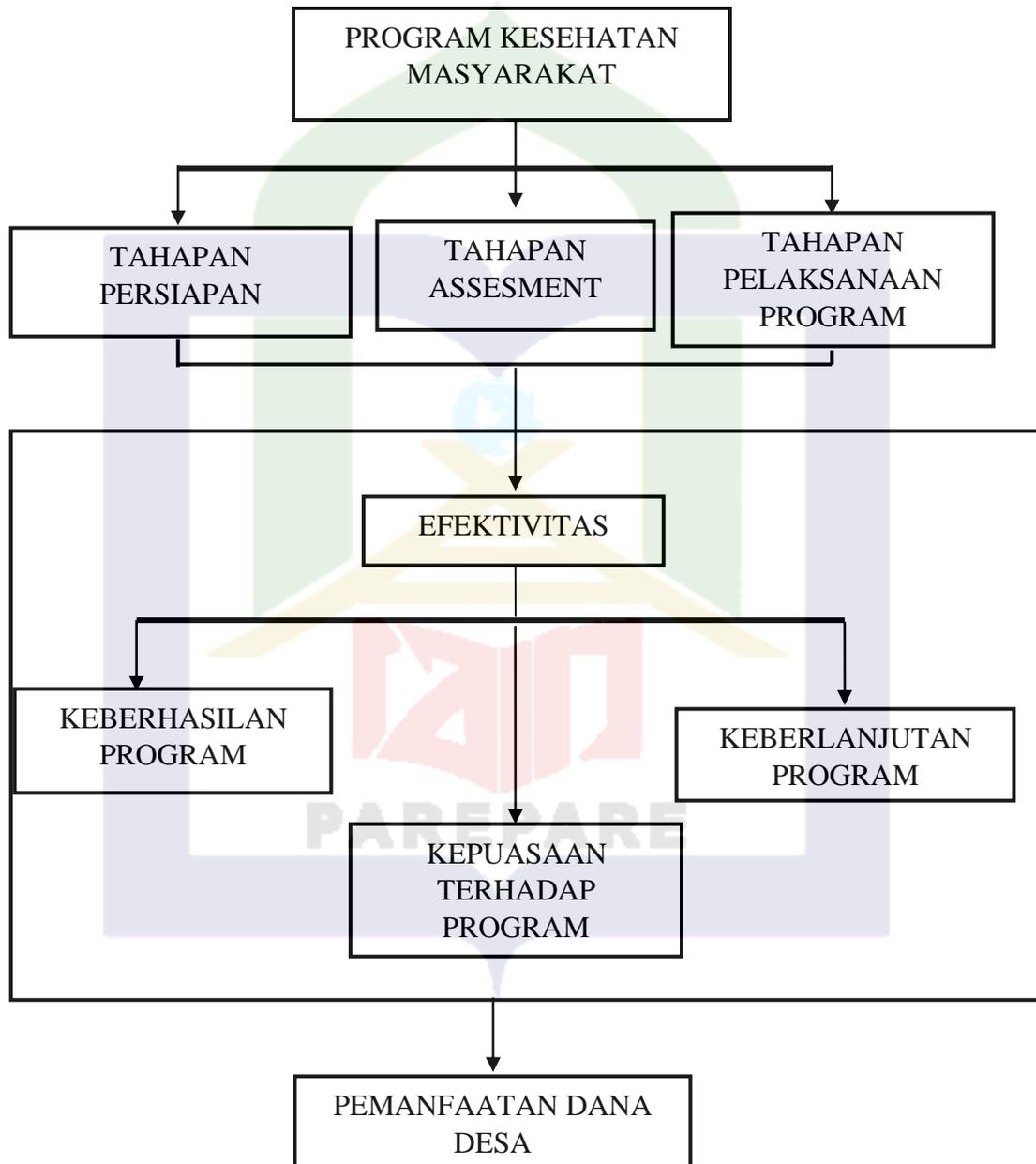
3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (palingsedikit 10%)

4) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)

5) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota

- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.4.1

